

Respons KH. Saifuddin Zuhri Terhadap Pendudukan Yahudi di Palestina Tahun 1936-1948

Roni Syahroni¹, Dadan Rusmana², Ajid Thohir³, Muhajir Salam⁴,
Asep Achmad Hidayat⁵

UIN Sunan Gunung Djati^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: inorsyahroni80@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 15-07-2025
Disetujui 21-07-2025
Diterbitkan 23-07-2025

ABSTRACT

This study explores the response of KH. Saifuddin Zuhri, one of Indonesia's prominent Islamic scholars and independence fighters, to the Jewish occupation of Palestine during the period 1936–1948. This period was marked by escalating conflict between the Palestinian population and Zionist groups supported by Britain under the British Mandate for Palestine. The focus of this research is on how KH. Saifuddin Zuhri, as part of the Indonesian Islamic elite, viewed and responded to the Palestinian issue, which at the time had become a central concern in the Islamic world. The study employs a historical method consisting of four main stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that KH. Saifuddin Zuhri consistently opposed the Jewish occupation of Palestine through his writings, speeches, and advocacy in both religious and national forums. His response was rooted in the spirit of Islamic solidarity (ukhuwah Islamiyah) and anti-colonial principles that formed part of the broader struggle of the global Muslim community during that era. These findings indicate that the Palestinian issue was not only a concern for the Arab world but also received serious attention from Indonesian scholars, reflecting the influence of Pan-Islamic movements in the 20th century.

Keywords: KH. Saifuddin Zuhri, Palestine, Ulama Response, Jewish Occupation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas respons KH. Saifuddin Zuhri, salah satu tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia, terhadap pendudukan Yahudi di Palestina pada periode 1936–1948. Periode tersebut ditandai dengan meningkatnya eskalasi konflik antara masyarakat Palestina dengan kelompok Zionis yang didukung Inggris melalui Mandat Palestina. Fokus kajian ini adalah bagaimana sikap dan pandangan KH. Saifuddin Zuhri sebagai bagian dari elite ulama Indonesia menanggapi persoalan Palestina yang saat itu menjadi isu sentral dunia Islam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Saifuddin Zuhri secara konsisten menentang pendudukan Yahudi atas Palestina melalui tulisan, pidato, dan advokasi dalam forum keagamaan dan kebangsaan. Respons ini dilandasi oleh semangat solidaritas Islam (ukhuwah Islamiyah) dan prinsip anti-kolonialisme yang menjadi bagian dari perjuangan umat Islam global pada masa itu. Temuan ini menunjukkan bahwa isu Palestina tidak hanya menjadi perhatian dunia Arab, tetapi juga memperoleh perhatian serius dari ulama Nusantara sebagai bagian dari gerakan Pan-Islamisme di abad ke-20.

Kata Kunci: KH. Saifuddin Zuhri, Palestina, Respons Ulama, Pendudukan Yahudi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syahroni, R., Rusmana, D., Thohir, A., Salam, M. & Asep Achmad Hidayat (2025). Respons KH. Saifuddin Zuhri Terhadap Pendudukan Yahudi di Palestina Tahun 1936-1948. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2407-2424. <https://doi.org/10.63822/5ttten04>

PENDAHULUAN

Masalah Palestina merupakan isu yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dominasi Yahudi-Zionis dalam aspek militer, politik, dan budaya di Palestina dipandang sebagai tantangan terbesar bagi umat Islam dalam usahanya meraih kemerdekaan, persatuan, dan kebangkitan. Masalah Palestina sendiri tidak dianggap semata-mata sebagai persoalan lokal, melainkan bagian dari agenda besar persekutuan Barat-Zionis yang sejak awal berupaya menciptakan perpecahan dan kelemahan di kalangan umat Islam. Strategi tersebut ditujukan agar umat Islam terus berada dalam posisi subordinat terhadap kekuatan adidaya dunia.

Selama periode 1517 hingga 1917, Palestina berada di bawah kendali Turki Utsmani, yang mengintegrasikan wilayah ini ke dalam Provinsi Suriah (*Vilayet Suriah*). Pada masa itu, Palestina mencakup Muttasharifat Jerusalem serta kota-kota seperti Jaffa, Hebron, dan Betlehem. Kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia I (1914-1918) dari Inggris dan sekutunya membawa dampak besar pada perubahan peta politik di Timur Tengah. Kekuasaan Utsmani atas wilayah tersebut, termasuk Palestina, berakhir. Wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris berdasarkan Sistem Mandat yang disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Inggris bertindak sebagai kekuatan mandat, dan secara resmi mengatur wilayah Palestina dengan dalih mempersiapkan kemerdekaan bangsa Arab. Namun kenyataannya, Inggris secara aktif memfasilitasi imigrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina dan mendukung pembangunan institusi-institusi Zionis.

Inggris telah lama berusaha menguasai wilayah Palestina dengan dalih keinginan merelokasi orang-orang Yahudi yang menghadapi masalah di Eropa. Namun, Sultan Abdul Hamid II secara konsisten menolak permintaan Inggris dan komunitas Yahudi untuk mendirikan pemukiman resmi di Palestina, meskipun pada saat itu kekuasaan Turki Utsmani sudah semakin melemah. Kondisi dalam negeri yang lemah membuat Turki Utsmani enggan terlibat dalam konflik militer, namun kekuasaan saat itu berada di bawah kendali pemerintahan militer yang dipimpin oleh Enver Pasha dan Talat Pasha, setelah penggulingan Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1908. Pada 22 Juli 1914, Turki Utsmani menawarkan aliansi kepada Jerman, yang diterima oleh Wilhelm II pada 2 Agustus 1914, sehingga Turki Utsmani resmi bergabung dengan Blok Sentral.

Setelah mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I, Turki Utsmani tidak lagi memiliki kuasa untuk mencegah ketika Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang memberikan izin kepada orang-orang Yahudi untuk membangun permukiman di wilayah tersebut, karena pada saat itu Palestina secara *de jure* berada di bawah kekuasaan Inggris. Penyerahan wilayah Palestina dan sejumlah kawasan sekitarnya, oleh Inggris kepada Zionis-Yahudi merupakan bagian dari kesepakatan sebagai imbalan atas dukungan gerakan Zionis internasional terhadap Inggris dalam Perang Dunia I.

Sejak tahun 1917 terjadi sebuah kesepakatan yang dianggap tidak lazim antara pemerintah Inggris dan komunitas Yahudi. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, secara resmi menjanjikan pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina, sebuah wilayah yang secara historis tidak pernah ditaklukkan maupun dihuni secara signifikan oleh bangsa Yahudi. Keputusan ini dipandang sebagai awal mula ketidakadilan di Palestina.

Jatuhnya Palestina ke tangan Inggris menandai awal dari proses keruntuhan Kekhalifahan Utsmani yang bermarkas di Istanbul. Awalnya, kelompok Turki Muda berhasil melemahkan posisi Khalifah dengan membatasi perannya sebatas simbol keagamaan, hingga akhirnya pada Maret 1924 institusi kekhalifahan secara resmi dihapus dan digantikan oleh Negara Turki sekuler. Banyak analisis menyebut bahwa keruntuhan ini lebih disebabkan oleh melemahnya otoritas Khalifah dari dalam, terutama akibat pengaruh

kuat gerakan Turki Muda yang bersekutu dengan Inggris dan kelompok Zionis Yahudi, dibandingkan sekadar karena kekalahan militer dalam Perang Dunia I.

Keruntuhan Kekhilafahan Turki Utsmani berdampak langsung terhadap semakin memburuknya kondisi Palestina. Inggris, setelah menguasai wilayah tersebut, memisahkannya dari wilayah Suriah berdasarkan kesepakatan rahasia dengan Prancis dalam Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916. Setelah Inggris menguasai kawasan Palestina, termasuk Baitul Maqdis, mereka menyerahkan kepemimpinan wilayah tersebut kepada seorang tokoh Yahudi, Herbert Samuel, yang menjabat sebagai Komisaris Tinggi antara tahun 1920 hingga 1925. Sejak saat itu hingga berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, para penguasa yang ditunjuk oleh Inggris di wilayah Palestina secara umum dianggap menjalankan kebijakan yang mendukung proyek pendirian negara Yahudi dan mendorong marginalisasi serta pengusiran penduduk Arab-Palestina dari tanah mereka sendiri.

Runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani serta jatuhnya Palestina yang didalamnya terdapat salah satu warisan agung umat Islam, yakni Masjid al-Aqsha di Baitul Maqdis, menjadi perhatian serius bagi umat Islam, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Dalam konteks tersebut, umat Islam Indonesia, meskipun masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina. Umat Islam di Indonesia pada masa itu tengah berada dalam fase akhir penjajahan oleh bangsa Eropa, khususnya Belanda yang telah lama mencengkeram kekuasaannya di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim ini. Oleh karena itu, kondisi umat Islam Indonesia kurang lebih serupa dengan umat Islam di Palestina, sama-sama berada di bawah kekuasaan kolonial. Namun, kesamaan nasib ini tidak membuat umat Islam Indonesia kehilangan sensitivitas dan kepedulian terhadap penderitaan sesama Muslim di belahan dunia lain. Sikap tersebut tidak terlepas dari kuatnya ikatan keagamaan (ukhuwah Islamiyah), semangat Pan-Islamisme, dan kesadaran antikolonial yang tumbuh pesat di kalangan umat Islam Indonesia sejak awal abad ke-20.

Salah satu tokoh yang memperlihatkan komitmen kuat terhadap perjuangan Palestina adalah KH. Saifuddin Zuhri, seorang ulama, jurnalis, dan aktivis Nahdlatul Ulama yang kelak menjadi Menteri Agama RI. Respons beliau terhadap isu Palestina mencerminkan kepedulian umat Islam Indonesia terhadap nasib umat seagama di belahan dunia lain. Penelitian ini menempatkan KH. Saifuddin Zuhri dalam kerangka Pan-Islamisme, sebuah ideologi yang mendorong persatuan umat Islam global dalam melawan imperialisme dan ketidakadilan. Melalui pendekatan sejarah ide dan gerakan sosial-keagamaan, tulisan ini juga menelaah bagaimana gagasan dan tindakan KH. Saifuddin Zuhri dibentuk oleh konteks sosial dan keagamaan zamannya. Untuk memperdalam pemahaman terhadap bentuk respons yang muncul, digunakan teori konflik sosial Anthony Oberschall, yang menekankan pentingnya mobilisasi kolektif dalam memunculkan aksi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi sejarah yang berusaha merekonstruksi secara ilmiah bagaimana respons KH. Saifuddin Zuhri sebagai tokoh NU terhadap pendudukan Yahudi di Palestina selama periode 1917 hingga 1948. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pada tahap heuristik, peneliti mencari sumber-sumber sejarah berupa dokumen tertulis, baik sumber primer maupun sekunder.

Sumber primer yang digunakan antara lain majalah Berita Nahdlatul Ulama yang terbit pada tahun 1936-1939, yang penulis peroleh langsung dari Perpustakaan PBNU Pusat di Jakarta, dalam bentuk fotokopi, surat kabar sezaman lainnya dan buku yang ditulis langsung KH. Saifuddin Zuhri yang berjudul “Palestina dari Masa ke Masa”. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bagian Penerbitan-Penyiaran, bulan Desember tahun 1947. Bersampul cokelat, salah satunya yang dikoleksi Perpustakaan Masjid Syuhada’ Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku ini diterbitkan kembali oleh Komunitas Pegon Banyuwangi, bulan November 2023. Untuk melengkapi data, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku koleksi pribadi dan artikel dari website resmi Nahdhatul Ulama.

Seluruh sumber tersebut kemudian dianalisis melalui kritik eksternal untuk menilai keaslian fisiknya, dan kritik internal untuk menilai isi melalui pembacaan kritis, guna memperoleh fakta sejarah yang valid. Fakta-fakta yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, ditafsirkan, disusun secara sistematis, dan akhirnya disajikan dalam bentuk narasi sejarah (historiografi).

PEMBAHASAN

1. Asal Usul Palestina

Palestina adalah sebuah nama untuk menyebut wilayah di bagian barat daya negeri Syam. Sebuah wilayah yang terletak di bagian barat benua Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Palestina menempati posisi strategis karena menjadi penghubung antara benua Asia dan Afrika. Selain itu, letaknya menjadikannya sebagai titik temu penting bagi wilayah-wilayah dalam dunia Islam. Dalam catatan sejarah, wilayah ini dikenal dengan nama Kan’an, karena yang pertama kali bermukim di sini adalah bangsa Kan’an yang berasal dari Jazirah Arab sekitar tahun 2500 SM.

Menurut Al-Ghadiry, dalam sejarah kuno, wilayah Palestina dikenal sebagai tanah Kan’an. Penyebutan ini tercatat dalam laporan pemimpin pasukan King Mary dan juga ditemukan pada tugu Adrimi, peninggalan Raja Alkha (*Tal Al-A’tashenah*) yang berasal dari pertengahan abad ke-5 SM. Asal kata Palestina berasal dari kata *Philsta*, sebagaimana disebutkan dalam catatan Asiria pada masa pemerintahan Raja Assyria (Addizari III) sekitar 800 SM. Kata Palestina disebutkan juga oleh Herodotus dalam basis Aramen, yang mengacu pada sebuah tempat di bagian Selatan Syria atau Syria Palestina dekat Finithya hingga batas-batas Mesir.

Sejumlah sejarawan Rumania seperti Agathar Chides, Starbo, dan Diodoru telah menggunakan istilah Palestina untuk merujuk pada wilayah tanah suci. Istilah ini kemudian diresmikan sebagai nama distrik pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian, dan sejak saat itu penggunaannya meluas, terutama dalam laporan-laporan ziarah Kristen oleh gereja. Dalam periode Islam, Palestina dianggap sebagai bagian dari Bilad al-Syam. Selain letaknya yang strategis, kesuburan tanah Palestina turut memperkuat peran historisnya sebagai kawasan yang dihuni sejak masa kuno dan berfungsi sebagai simpul budaya antara berbagai peradaban dunia.

Temuan arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah menghuni wilayah Palestina sejak zaman prasejarah dalam bentuk manusia tegak. Pada masa itu, nenek moyang mereka hidup sebagai pemburu yang mengejar berbagai jenis hewan, menandakan adanya perkembangan dalam strategi berburu. Mereka mulai menggunakan peralatan dari batu, dan pada tahap ketiga Zaman Batu, muncul inovasi berupa pembuatan pisau dari pedang panjang yang menjadi alat utama saat itu. Bukti keberadaan mereka ditemukan di sejumlah gua di Palestina, seperti gua al-Amira, Irc al-Ahmar, al-Wald, Kubarah, dan berbagai lokasi lainnya di gurun Negev.

Pada zaman dahulu, batas-batas wilayah Palestina belum memiliki bentuk yang pasti sebagaimana dikenal pada masa sekarang. Kepastian mengenai wilayahnya baru mulai terlihat secara lebih konkret pada masa penjajahan Inggris atas Palestina antara tahun 1920 hingga 1923. Dalam perjalanan sejarahnya, penetapan batas wilayah ini terkadang menyempit dan meluas, namun secara umum ada hal yang konstan tentang wilayah ini bahwa ia tetap terletak di antara Laut Tengah, Laut Mati dan Sungai Jordan sebagai bagian dari wilayah negeri Syam.

Menentukan batas wilayah Palestina secara historis bukanlah hal yang mudah, sebab pembahasan yang dilakukan tidak bersifat rinci dan mendalam. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa Bizantium hingga pertengahan abad ke-4 M, wilayah Palestina terbagi ke dalam tiga wilayah administratif utama yang menunjukkan perkembangan penting secara historis. Pertama, batas wilayah ini meliputi sebelah utara mulai dari selatan gunung Karmel dan padang Ibnu Ameer, sebelah selatan berupa garis yang membentang dari selatan Rafah ke arah timur sampai pertengahan Laut Mati. Perbatasan timur wilayah ini meliputi bagian-bagian timur Yordania, garis perbatasannya melewati selatan Bisan dan membelah sungai Yordan yang mengelilingi wilayah antara Ajloun untuk sebelah utara dan ujung Laut Mati untuk sebelah tenggara. Yang menjadi jantung Palestina I ketika itu adalah kota Qasariyah yang meliputi kota al-Quds, Nablus, Yafa, Gaza dan Asqalan. Kedua, wilayah ini meliputi pegunungan el-Jalil, Maraj Ibn Ameer dan dataran-dataran tinggi yang membentang ke arah timur dari danau Thabriyah, yakni wilayah-wilayah bagian timur Yordania dan Suriah sekarang ini. Ketiga, wilayah ini mencakup daerah-daerah yang terletak di sebelah selatan garis Rafah – Laut Mati, sampai Teluk Aqabah. Wilayah ini berpusat di kota al-Betraa yang sekarang ini terletak di wilayah bagian timur Yordania.

2. Awal Pendudukan Yahudi di Palestina

Masalah Palestina merupakan salah satu isu internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan di dunia modern. Konflik ini bermula dari proses masuknya komunitas Yahudi ke Palestina, yang kemudian berujung pada pendirian negara Israel tahun 1948. Namun, pendudukan Yahudi di Palestina tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses yang terencana dan sistematis. Gerakan Zionisme, lahir pada akhir abad ke-19, menjadi penggerak utama ide pembentukan negara Yahudi di Palestina. Momentum semakin kuat ketika kekuatan kolonial barat, khususnya Inggris, memberikan dukungan politik melalui Deklarasi Balfour tahun 1917.

Gerakan Zionisme muncul sebagai respons terhadap meningkatnya anti-Semitisme di Eropa, khususnya di kawasan Eropa Timur dan Rusia, yang ditandai dengan gelombang pogrom (pembantaian) terhadap komunitas Yahudi serta kebijakan diskriminatif yang membatasi hak-hak sipil mereka. Dalam konteks sosial-politik ini, sebagian besar Yahudi Eropa mulai meyakini bahwa integrasi penuh dalam masyarakat Eropa tidak mungkin tercapai, sehingga diperlukan solusi yang lebih radikal. Gagasan mendirikan sebuah tanah air Yahudi (*Jewish Homeland*) kemudian menjadi inti dari ideologi Zionisme. Theodor Herzl, seorang jurnalis dan aktivis politik asal Austria, menjadi figur sentral dalam gerakan ini melalui karya monumentalnya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) yang diterbitkan pada tahun 1896.

Herzl dalam buku tersebut berargumen bahwa persoalan Yahudi tidak dapat diselesaikan melalui asimilasi atau reformasi sosial semata, melainkan harus melalui pendirian sebuah negara Yahudi yang berdaulat. Herzl mengusulkan Palestina sebagai lokasi ideal bagi negara tersebut, dengan alasan historis-religius, meskipun dalam pertemuan awal Kongres Zionis Basel tahun 1897 sempat muncul usulan alternatif seperti Uganda. Sejak saat itu, Zionisme berkembang menjadi sebuah gerakan politik internasional yang terorganisir, yang kemudian berhasil menggalang dukungan di kalangan komunitas

Yahudi diaspora dan memperoleh legitimasi politik melalui berbagai peristiwa global, termasuk Deklarasi Balfour tahun 1917.

Wilayah Palestina menjadi bagian dari kekuasaan Dinasti Turki Utsmani pada awal abad ke-16, tepatnya setelah Sultan Selim I mengalahkan Dinasti Mamluk pada tahun 1517. Sejak saat itu, Palestina berada di bawah otoritas Turki Utsmani selama empat abad hingga berakhirnya kekuasaan tersebut akibat kekalahan dalam Perang Dunia I pada tahun 1917. Dalam rentang waktu yang panjang itu, Palestina mengalami berbagai dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang membentuk identitas kawasan tersebut hingga masa modern.

Pada tahun 1516, Sultan Selim I dari Turki Utsmani memulai ekspedisi militer melawan Dinasti Mamluk yang saat itu menguasai Suriah, Palestina, dan Mesir. Kemenangan Utsmani dalam Pertempuran Marj Dabiq (1516) dan Ridaniya (1517) mengakhiri dominasi Mamluk dan menandai dimulainya kekuasaan Utsmani atas wilayah Syam, termasuk Palestina. Setelah penaklukan tersebut, Palestina dijadikan bagian dari wilayah administratif (*eyalet*) Damaskus dan kemudian mengalami beberapa kali reorganisasi administratif sepanjang masa Utsmani.

Secara administratif, Palestina tidak dipandang sebagai satu kesatuan terpisah, melainkan dibagi ke dalam beberapa distrik (*sanjak*) yang termasuk dalam *eyalet* Damaskus dan kemudian *Vilayet* Suriah dan *Vilayet* Beirut. Kota-kota seperti Yerusalem, Nablus, dan Gaza menjadi pusat-pusat administratif penting. Yerusalem bahkan memperoleh status khusus sebagai *mutasarriflik* yang langsung berada di bawah kekuasaan Istanbul karena nilai religius dan politiknya. Pemerintahan Utsmani menerapkan sistem timar dan kemudian beralih ke sistem pajak tetap (*iltizam*), di mana tanah-tanah diserahkan kepada para pejabat lokal atau penyewa pajak sebagai balas jasa. Sistem ini sering kali menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah, terutama bagi petani lokal.

Kehidupan sosial di Palestina selama masa Utsmani mencerminkan pluralitas agama dan budaya. Meskipun mayoritas penduduk adalah Muslim, komunitas Kristen dan Yahudi juga hidup berdampingan dan mendapatkan perlindungan melalui sistem *millet*, suatu sistem yang memberikan otonomi kepada komunitas agama dalam mengatur urusan internal mereka. Yerusalem, sebagai kota suci tiga agama, menjadi simbol penting dalam narasi kekuasaan Utsmani. Banyak sultan Utsmani yang memberi perhatian besar terhadap perbaikan dan pemeliharaan situs-situs suci di kota tersebut, termasuk renovasi Dome of the Rock dan Masjid al-Aqsha.

Perekonomian Palestina pada masa Turki Utsmani bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Produk utama pertanian termasuk gandum, zaitun, dan buah-buahan. Posisi geografis Palestina yang strategis memungkinkan berlangsungnya aktivitas perdagangan antara Asia dan Afrika melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Jaffa dan Akka. Namun, korupsi dalam sistem pajak dan ketidakstabilan politik lokal sering menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi.

Pada pertengahan abad ke-19, Kesultanan Utsmani meluncurkan reformasi *Tanzimat* (1839-1876) dalam rangka modernisasi dan sentralisasi kekuasaan. Reformasi ini mencakup hukum, pendidikan, militer, dan administrasi. Di Palestina, *Tanzimat* membawa perubahan dalam pengelolaan tanah melalui Undang-Undang Tanah 1858 yang mewajibkan pendaftaran tanah secara resmi. Namun, dalam praktiknya, banyak petani miskin tidak mendaftarkan tanah mereka karena takut dikenai pajak, sehingga tanah-tanah tersebut jatuh ke tangan elite lokal atau spekulan asing. Reformasi ini juga membuka peluang bagi kekuatan Eropa untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Palestina, baik melalui misi keagamaan, kegiatan arkeologi, maupun pembelian tanah oleh organisasi-organisasi Yahudi Eropa.

Sejak akhir abad ke-19, gelombang imigrasi Yahudi ke Palestin mulai meningkat, terutama sebagai respon terhadap gelombang antisemitisme di Eropa Timur dan munculnya gerakan Zionisme. Imigrasi ini difasilitasi oleh pembelian tanah oleh organisasi seperti *Jewish Colonization Association* dan *Jewish National Fund*. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab lokal dan menjadi cikal bakal konflik yang lebih besar di abad ke-20. Sementara itu, kebangkitan nasionalisme Arab juga mulai muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintahan Utsmani dan meningkatnya intervensi Eropa. Gerakan nasionalisme ini menjadi landasan penting dalam perjuangan bangsa Arab, termasuk Palestina, di masa setelah kejatuhan Turki Utsmani.

Kekuasaan Turki Utsmani di Palestina berakhir pada tahun 1917 setelah pasukan Inggris di bawah Jenderal Edmund Allenby merebut Yerusalem dalam kampanye militer di tengah Perang Dunia I. Kekalahan Utsmani dalam perang tersebut berujung pada perjanjian Sevres (1920) dan kemudian perjanjian Lausanne (1923), yang secara resmi mengakhiri kekuasaan mereka atas wilayah-wilayah Arab, termasuk Palestina.

3. Palestina Pada Masa Pendudukan Inggris

Pendudukan Inggris atas Palestina dimulai secara resmi pada tahun 1917, setelah pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Edmund Allenby berhasil merebut Yerusalem dari tangan Turki Utsmani pada 9 Desember 1917. Kejatuhan Yerusalem merupakan bagian dari kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia I di front Timur Tengah. Inggris kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui pembentukan administrasi militer yang kemudian diganti dengan Mandat Inggris atas Palestina, yang secara resmi disahkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922.

Tujuan utama Inggris dalam menguasai Palestina tidak semata-mata bersifat militer atau strategis, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik internasional, terutama yang berkaitan dengan Deklarasi Balfour (1917) yang menyatakan dukungan Inggris terhadap pendirian “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di Palestina. Hal ini menjadi titik awal perubahan drastis dalam demografi dan geopolitik Palestina. Setelah diresmikan sebagai wilayah Mandat pada tahun 1922, Inggris membentuk struktur pemerintahan sipil di Palestina. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang Komisaris Tinggi (High Commissioner) yang memiliki wewenang penuh atas administrasi wilayah tersebut. Inggris memperkenalkan sistem hukum baru, membangun infrastruktur, dan menyusun kebijakan-kebijakan yang seringkali berpihak pada kepentingan Zionis.

Undang-undang pertanahan, perizinan imigrasi Yahudi, serta pembatasan politik terhadap masyarakat Arab Palestina menjadi instrumen pendukung terhadap implementasi proyek Zionisme. Masyarakat Arab Palestina, yang awalnya mengira Inggris akan menjamin hak mereka atas tanah dan kemerdekaan, segera menyadari bahwa kebijakan Inggris lebih mengakomodasi ambisi Yahudi internasional.

Salah satu aspek paling mencolok selama pendudukan Inggris adalah peningkatan drastis jumlah imigran Yahudi ke Palestina. Imigrasi ini berlangsung dalam beberapa gelombang (Aliyah), dimulai sejak awal abad ke-20, tetapi mengalami percepatan selama masa Mandat. Pemerintah Inggris, dalam pelaksanaan Mandatnya, memberikan izin resmi bagi ribuan orang Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina. Di antara tahun 1920-1947, populasi Yahudi meningkat dari sekitar 84.000 menjadi lebih dari 630.000 jiwa. Peningkatan ini mengubah komposisi demografis Palestina dan menimbulkan ketegangan yang semakin akut antara komunitas Arab dan Yahudi. Perubahan ini menjadi penyebab utama konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.

Masyarakat Arab Palestina merespon dengan perlawanan terhadap kebijakan Inggris yang dianggap tidak adil. Bentuk perlawanan ini mencakup protes damai, boikot ekonomi, hingga pemberontakan bersenjata. Salah satu peristiwa penting adalah Revolusi Arab Palestina 1936-1939, yang merupakan gerakan pemberontakan besar-besaran terhadap dominasi Inggris dan Zionisme. Revolusi ini dipimpin oleh Komite Tinggi Arab dan tokoh-tokoh seperti Hajj Amin al-Husseini, Mufti Besar Yerusalem. Meski menunjukkan semangat nasionalisme yang kuat, gerakan ini akhirnya dapat dipadamkan oleh Inggris melalui tindakan militer dan penangkapan para pemimpin Arab. Kekalahan ini melemahkan kekuatan politik Arab Palestina menjelang berakhirnya Mandat Inggris.

Setelah Perang Dunia II, tekanan internasional terhadap Inggris meningkat. Masalah pengungsi Yahudi Eropa pasca-*Holocaust* memperkuat tekanan Zionis agar Inggris membuka kembali pintu imigrasi ke Palestina. Namun, perlawanan bersenjata dari kelompok Zionis radikal seperti Irgun dan Lehi membuat situasi keamanan semakin memburuk. Inggris kemudian menyerahkan persoalan Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi dua negara: satu Arab dan satu Yahudi. Penolakan Arab terhadap rencana ini menyebabkan pecahnya konflik bersenjata antara komunitas Arab dan Yahudi.

Pada 14 Mei 1948, Inggris mengakhiri Mandatnya dan menarik diri dari Palestina. Di hari yang sama, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Sejak saat itu, konflik Palestina-Israel memasuki babak baru yang ditandai dengan perang Arab-Israel 1948 dan eksodus massal rakyat Palestina yang dikenal sebagai Nakbah (malapetaka).

4. Pan Islamisme: Penghubung Solidaritas Umat Islam Indonesia Terhadap Isu Palestina

Untuk memahami respons KH. Saifuddin Zuhri secara khusus dan respons aktivis Islam Indonesia secara umum terhadap berbagai persoalan di dunia Islam, penting untuk meninjau kembali gagasan Pan-Islamisme yang mencuat pada abad ke-20. Gagasan ini, yang disuarakan oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Waliyullah Ad-Dahlawi, mengusung ide persatuan umat Islam global sebagai respons terhadap menguatnya kolonialisme Eropa atas negeri-negeri Islam di Asia dan Afrika. Kemandekan politik yang melanda Kesultanan Turki Utsmani sejak abad ke-19, yang sebelumnya menjadi pelindung utama wilayah Islam, memperkuat urgensi ide ini. Situasi tersebut mencapai titik kritis saat kekalahan Utsmani dalam Perang Dunia I, yang menyebabkan runtuhnya kekhalifahan terakhir dalam sejarah Islam.

Gagasan Pan-Islamisme dengan cepat menjadi wacana yang meluas di berbagai wilayah dunia Islam, baik di kawasan yang telah lama berada di bawah penjajahan seperti Asia Tenggara, maupun di wilayah yang baru saja lepas dari kekuasaan Turki Utsmani seperti Timur Tengah. Umumnya, ide ini tumbuh di kalangan para pemimpin dan cendekiawan Muslim yang saling terhubung, terutama melalui pertemuan penting seperti ibadah haji di Mekah dan perkuliahan di institusi-institusi keilmuan Islam, seperti Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir. Penyebaran gagasan ini berlangsung cepat dan mendorong meningkatnya semangat persatuan umat Islam pada awal abad ke-20 dalam menghadapi tekanan kolonialisme Barat.

Gerakan-gerakan Islam yang dibentuk oleh para aktivis pada awal abad ke-20 sejatinya tidak secara eksplisit mengusung misi Pan-Islamisme, melainkan berfokus pada upaya memperjuangkan kondisi umat Islam Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Namun demikian, semangat Pan-Islamisme yang berkembang luas saat itu ikut memberikan pengaruh kuat dalam membangkitkan kesadaran anti-

kolonialisme, sehingga perjuangan melawan penjajahan sejalan dengan cita-cita persatuan umat Islam yang digaungkan oleh para tokoh Pan-Islamisme dari Timur Tengah.

Wacana Pan-Islamisme tidak hanya membangkitkan semangat anti-kolonialisme di kalangan umat Islam Indonesia, tetapi juga memperkuat rasa solidaritas terhadap sesama Muslim di berbagai belahan dunia. Kesadaran akan satu kesatuan umat yang telah tumbuh sejak lama semakin menguat melalui gagasan ini, sehingga isu-isu yang menyangkut penderitaan umat Islam, termasuk di Palestina, menjadi perhatian utama dalam berbagai forum dan publikasi gerakan Islam di Indonesia hingga masa kini.

Salah satu bentuk respons nyata para aktivis Islam di Indonesia terhadap isu persatuan umat Islam dapat dilihat dari sikap mereka atas runtuhnya Kekhilafahan Utsmani. Sarekat Islam, sebagai pelopor gerakan Islam yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan politik umat, secara aktif menanggapi peristiwa tersebut. Melalui beberapa terbitan majalahnya, organisasi ini menyatakan keprihatinannya atas keruntuhan kekhilafahan terakhir dalam sejarah Islam. Lebih jauh lagi, Sarekat Islam menggagas penyelenggaraan Kongres Al-Islam sebagai upaya mempersatukan kekuatan gerakan Islam di Indonesia. Dalam forum tersebut, isu keruntuhan kekhilafahan menjadi topik penting yang dibahas dan mendapat perhatian luas dari berbagai organisasi Islam yang terlibat.

Keruntuhan Turki Utsmani bukan semata-mata menjadi persoalan bangsa Turki, melainkan telah menjadi persoalan seluruh umat Islam. Hal ini disebabkan karena lembaga khilafah telah berdiri dan menyatu dengan umat Islam selama lebih dari seribu tahun. Hubungan antara umat Islam dan institusi khilafah, serta faktor-faktor penyebab keruntuhannya, menjadi bahan diskursus yang terus diperbincangkan hingga kini. Muhammad Dhiya'uddin al-Rayis, seorang Guru Besar Jurusan Sejarah Islam Universitas Kairo mengatakan bahwa: "Sesungguhnya Khilafah ini bukan milik Turki saja melainkan milik dunia Islam seluruhnya. Ia adalah Sebagian dari warisan umat Islam, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka. Khilafah merupakan pimpinan spiritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi. Khilafah ini telah berlangsung lebih dari seribu tiga ratus tahun. Yaitu sejak umat Islam mengadakan rapat untuk memilih Abu Bakar Shiddiq (Sahabat Nabi) sebagai pengganti Rasulullah Muhammad Saw. Beliau itulah sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam, diikuti oleh khalifah kedua al-Faruq Umar bin al-Khattab, begitulah seterusnya silih berganti sepanjang masa, dalam berbagai dinasti sehingga berakhir pada abad keduapuluh ini. Oleh karena itu, wajar jika umat Islam memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal khilafah ini dan memikirkan akibatnya, serta berpikir apa yang akan terjadi kelak di masa mendatang."

Kongres Al-Islam di Hindia Belanda diselenggarakan sebagai upaya untuk menyatukan aspirasi dan kekuatan umat Islam yang saat itu tergabung dalam berbagai organisasi yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, sembilan kali Kongres Al-Islam diselenggarakan dalam rentang waktu yang tidak tetap antara tahun 1922 hingga 1932. Penyelenggaraan kongres-kongres tersebut bertepatan dengan munculnya isu penting mengenai kekhilafahan. Dalam rangkaian Kongres Al-Islam ini, berbagai persoalan keagamaan serta respons umat Islam terhadap permasalahan khilafah menjadi pokok pembahasan utama.

Kongres Al-Islam pertama diselenggarakan di Cirebon pada tahun 1922. Tiga organisasi Islam yang turut berpartisipasi dalam kongres ini adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Selain itu, hadir pula golongan tradisional yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab dari Lembaga Pendidikan Tasywirul Afkar di Surabaya, serta KH. Asnawi, seorang ulama terkenal dari Kudus. Karena Kongres Al-Islam terutama membahas persoalan-persoalan keagamaan, yang dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan Al-Irsyad di satu pihak, serta golongan tradisional di pihak lain, maka dipilihlah Sarekat Islam sebagai pihak penengah dan pemimpin dalam penyelenggaraan kongres tersebut.

Dalam kongres ini, Haji Agus Salim untuk pertama kalinya mengemukakan pentingnya persatuan di antara umat Islam guna menghindari perpecahan dan pengaruh dari pihak-pihak luar. Ia memaparkan gagasannya tentang Pan-Islamisme, yakni sebuah upaya untuk mewujudkan persatuan di antara berbagai aliran dalam Islam serta mendorong kerja sama antarumat Muslim dalam menghadapi isu-isu penting yang menyangkut agama.

Selain berupaya “mendamaikan” pertikaian antara golongan pembaharu dan tradisional, Kongres Al-Islam pertama juga membahas perkembangan situasi di Turki. Salah satu topik yang dibicarakan adalah perang yang terjadi di Turki serta kemenangan Mustafa Kemal Pasha dalam konflik tersebut. Pada saat itu, Kemal dipandang sebagai pahlawan Islam karena berhasil mempertahankan wilayah Turki dari pendudukan pasukan Sekutu.

Setelah mendengar oeraian tentang peperangan balatentara jang dikepalai oleh pahlawan Islam Moestafa Kemala Pasja ditanah Soeria (Azia Ketjil), dengan maksoed menoen toet kembali djadjahan dan daerah keradjaan Turkey, jaitoe bagian Dar-al-Islam jang tadinja dengan nasib peperangan telah djatoeh kepada pihak lain, melahirkan sjoekoer dan soeka tjita atas rachmat dan nasr jang ditoendjoekkan oleh Toehan atas pasoeakan Islam dengan pahlawannja itoe.

Atas dorongan Haji Agus Salim, kongres mengirimkan sebuah telegram kepada Mustafa Kemal sebagai ucapan selamat atas kemenangannya. Sekitar pertengahan tahun 1924, umat Islam di Indonesia menerima undangan dari para ulama Al-Azhar untuk menghadiri Kongres Kairo. Kongres tersebut direncanakan akan berlangsung pada Maret 1925, dengan tujuan mengumpulkan seluruh perwakilan umat Islam dari berbagai belahan dunia guna memilih khalifah yang baru. Undangan tersebut diterima oleh beberapa tokoh Arab dan asosiasi Arab di Jakarta dan Surabaya. Beberapa di antara mereka kemudian mendekati H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, agar Indonesia dapat mengirimkan delegasi dalam kongres tersebut.

Pada tanggal 4–5 Oktober 1924, para pemimpin Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad mengadakan pertemuan di Surabaya untuk membahas perlu tidaknya mengirim delegasi ke Kongres Kairo. Selain dihadiri oleh para pemimpin nasional dan lokal dari ketiga organisasi tersebut, pertemuan ini juga melibatkan banyak ulama terkemuka, baik dari kalangan Arab maupun Jawa. Dalam pertemuan tersebut berlangsung diskusi yang panjang mengenai isu kekhilafahan dan rencana pengiriman delegasi ke Kongres di Kairo. Dalam pidatonya, H.O.S. Tjokroaminoto menyampaikan pentingnya umat Islam memiliki seorang khalifah serta menekankan perlunya keterlibatan aktif umat Islam di Indonesia dalam mendukung kepentingan kekhilafahan. Belum pernah dalam sejarah diadakan sebuah kongres agama Islam tingkat dunia; oleh karena itu, kongres di Kairo akan menjadi yang pertama. Mengingat pentingnya peristiwa ini sebagai kewajiban umat Islam, pengiriman utusan ke Kairo dianggap sangat perlu. Selanjutnya, Tjokroaminoto menegaskan bahwa sebagaimana telah diputuskan dalam Kongres Nasional Sarekat Islam sebelumnya, organisasi tersebut akan memberikan dukungan sepenuhnya, baik tenaga maupun pemikiran, demi perjuangan untuk menegakkan khilafah.

Pertemuan ini juga membahas konsep khilafah yang akan datang. Selama ini, khilafah hanya dianggap menangani urusan keagamaan semata, padahal sejatinya ia harus memiliki kekuasaan dalam urusan agama dan dunia sekaligus. Segala kebutuhan yang berkaitan dengan khilafah merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam, dan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa keberadaan khalifah adalah suatu keharusan. Disepakati pula perlunya dibentuk sebuah Majelis Khilafah yang dipimpin oleh seorang ketua, yang kemudian disebut sebagai khalifah. Para anggota majelis tersebut harus berasal dari perwakilan umat Islam dari masing-masing negeri. Dalam pertemuan itu, diusulkan agar khalifah berkedudukan di Mekah,

karena Mekah adalah tanah suci bagi seluruh umat Islam sedunia. Jika khalifah berkedudukan di negara tertentu, seperti Turki atau Mesir, dikhawatirkan ia akan lebih mementingkan kepentingan bangsa atau negaranya sendiri dibandingkan umat Islam dari negara lain. Oleh karena itu, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai khalifah harus tinggal di Mekah. Adapun mengenai siapa yang layak menjadi khalifah, hal tersebut akan didiskusikan dan diputuskan bersama umat Islam dari berbagai negara dalam pertemuan di Kairo nanti.

Sepanjang sejarah umat Islam Indonesia, pertemuan ini menjadi pertemuan khusus membahas khilafah yang pertama kali diadakan di Indonesia. Hasil penting dari pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa keberadaan khilafah adalah wajib, kesediaan mereka untuk menghadiri Kongres Khilafah di Kairo, dan membentuk Komite Khilafah sebagai wadah perjuangan khilafah di Indonesia. Setelah pertemuan ini, permasalahan khilafah menjadi agenda pembahasan Kongres Al-Islam.

Selama beberapa tahun, Sarekat Islam menjadi organisasi yang memperjuangkan gagasan Pan-Islamisme di Indonesia. Bagi mereka, perjuangan untuk menegakkan khilafah dipandang penting sebagai upaya mewujudkan cita-cita Pan-Islamisme, yaitu persatuan umat Islam di seluruh dunia di bawah satu aturan hidup yang berlandaskan ajaran Islam. Sebagaimana dipahami oleh H.O.S. Tjokroaminoto, Pan-Islamisme adalah bentuk persatuan yang paling mendalam di antara umat Islam, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Persatuan ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat Islam di dunia, yang terikat dalam satu sistem kehidupan Islam. Cita-cita ini tidak akan terwujud kecuali jika nilai-nilai Pan-Islamisme benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Para aktivis Islam di Indonesia menunjukkan komitmen besar terhadap persatuan umat Islam, sebagaimana terlihat dari partisipasi mereka dalam berbagai konferensi internasional yang membahas isu kekhilafahan, baik di Mekah maupun di Mesir. Meskipun pertemuan-pertemuan tersebut belum menghasilkan pembentukan kembali kekhilafahan, semangat solidaritas umat Islam tetap kuat di kalangan aktivis Indonesia. Mereka bahkan memandang nasionalisme yang sempit—yang hanya berfokus pada kepentingan bangsa tertentu—sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pandangan inilah yang kemudian membentuk cara pandang mereka terhadap isu Palestina, di mana kepedulian terhadap Palestina dianggap sebagai kelanjutan logis dari sikap mereka terhadap persoalan dunia Islam secara keseluruhan.

Pandangan para aktivis Islam di Indonesia terhadap isu Palestina tidak hanya berakar pada semangat persatuan umat Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh rasa solidaritas sebagai sesama bangsa yang mengalami penjajahan. Mereka menyadari bahwa penjajah yang dihadapi oleh rakyat Palestina adalah bangsa Eropa, musuh yang sama dengan penjajah di tanah air mereka. Oleh karena itu, dukungan terhadap perjuangan Palestina turut memperkuat semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia, dan menjadi salah satu faktor yang menyulut semangat kemerdekaan yang semakin berkobar.

Perhatian umat Islam Indonesia terhadap persoalan Palestina yang secara geografis jauh dan tidak berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, Islam sebagai agama universal telah membentuk identitas kolektif umat Islam sedunia, termasuk di Indonesia. Kedua, identitas ini semakin menguat seiring dengan adanya hubungan historis dan kultural antara komunitas Muslim Nusantara dan dunia Islam secara lebih luas. Ketiga, gagasan pan-Islamisme yang berkembang pada awal abad ke-20 mendorong semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan mendapat sambutan luas di Indonesia karena situasi penjajahan yang serupa. Keempat, gagasan tersebut turut memperkuat semangat nasionalisme. Kelima, solidaritas terhadap Palestina merupakan bagian dari

solidaritas keumatan global yang tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap sesama Muslim, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat semangat anti-kolonial dan nasionalisme di Indonesia. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina dan perjuangan kemerdekaan Indonesia saling memperkuat secara ideologis dan emosional.

5. Respons KH. Saifuddin Zuhri Terhadap Pendudukan Yahudi di Palestina 1936-1948

A. Menolak Kolonialisme dan Zionisme

Krisis kemanusiaan disebabkan pendudukan Yahudi di Palestina dirasakan secara mendalam oleh KH. Saifuddin Zuhri, seorang tokoh penting Nahdlatul Ulama yang hidup pada masa penjajahan, aktif dalam pergerakan nasional, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, hingga akhirnya menjadi Menteri Agama pada penghujung masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Bahkan, Kiai Saifuddin Zuhri secara tegas menyatakan bahwa hak bangsa Arab atas Palestina didasarkan pada landasan sejarah, fakta-fakta peristiwa, realitas yang ada, tuntutan keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, klaim bangsa Yahudi atas Palestina hanya bersandar pada ketamakan dan tindakan perampasan semata.

KH. Saifuddin Zuhri memandang Zionisme sebagai kelanjutan dari kolonialisme Barat. Dalam pandangannya, gerakan pendudukan Yahudi di Palestina tidak dapat dipisahkan dari konteks imperialisme global yang telah lama menindas bangsa-bangsa Timur. Menurut beliau, pendirian negara Israel bukan semata-mata hasil dari konflik politik regional, melainkan manifestasi baru dari kekuatan kolonial yang menindas dan meminggirkan masyarakat asli Palestina. Ia menilai bahwa pendudukan tersebut merupakan bentuk kezhaliman sistematis, karena secara paksa mengusir penduduk asli dari tanah kelahirannya, merampas hak-hak historis mereka, serta menghancurkan tatanan sosial dan budaya lokal. Ia menyamakan penderitaan rakyat Palestina dengan pengalaman bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, dan karena itu menyerukan solidaritas dunia Islam serta negara-negara yang pernah dijajah untuk menentang penjajahan dalam bentuk apa pun, termasuk Zionisme modern.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa perjuangan bangsa Arab, khususnya Palestina, bukan sekadar konflik agama atau sektarian, melainkan perjuangan eksistensial mempertahankan hak hidup dan kemerdekaan. Dalam kerangka ini, menurut KH. Saifuddin, mustahil bagi bangsa Arab—yang telah mengorbankan darah dan nyawa demi mempertahankan tanah airnya—untuk menyerah kepada penjajah. Mereka memiliki semangat anti-kolonial yang sama dengan yang pernah menginspirasi rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan asing.

KH. Saifuddin Zuhri, pada kesempatan yang lain juga mengkritik standar ganda dunia internasional yang seolah membenarkan pendudukan Israel dengan dalih sejarah dan klaim keagamaan, namun mengabaikan hak asasi dan penderitaan nyata rakyat Palestina. Ia menyuarakan pentingnya pendekatan keadilan dan kemanusiaan dalam menyikapi konflik ini, bukan sekadar mengikuti narasi kekuasaan yang dikendalikan oleh negara-negara besar. Bahkan ia menyoroti ketidakadilan yang dialami orang-orang Palestina. Menurutnya “sejarah dan keadilan tentu tidak akan membenarkan bahwa seorang tamu, yang asing, yang tidak memiliki keterikatan apa pun, merampas hak dan akhirnya mengusir tuan rumah.”. Menurutnya, wajar apabila bangsa Arab dan dunia Islam meyakini bahwa konflik di kawasan tersebut akan terus berlangsung dan sulit mereda. Sebab perbuatannya itu tidak akan menambah keuntungan bahkan sebaliknya hanya akan menambah kobaran api dendam kesumat dan permusuhan turun temurun. Dan pastilah dunia Islam akan menganggap Yahudi seluruhnya sebagai musuh sebesar-besarnya. Dunia Islam pastilah akan mencari daya upaya mencari kesempatan yang baik guna menyingkirkan kezaliman dan penganiayaan tersebut.

Pernyataan tersebut muncul sebagai hasil dari sidang organisasi-organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 18 Desember 1947. Sidang ini secara khusus membahas permasalahan Palestina dalam konteks perkembangan politik internasional saat itu. Dari pertemuan tersebut, disepakati tiga keputusan penting. Pertama, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kedua, mendorong Pemerintah Republik Indonesia agar mengambil sikap yang tegas dalam mendukung perjuangan bangsa Arab di Palestina. Ketiga, mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar meninjau kembali keputusan Sidang Pleno PBB tentang pembagian wilayah Palestina, yang dinilai sebagai pemicu terganggunya ketenteraman dan perdamaian dunia.

Sikap ini dilanjutkan oleh Partai Masyumi dalam keputusan sikap politik luar negeri Mukhtar Masyumi ke-III di Madiun pada 27-31 Maret 1948. Salah satu keputusan tersebut menyebutkan bahwa Masyumi memutuskan untuk, *“Mengirimkan radiogram kepada Mufti Besar Amin Al Huseini tentang perjuangan di Palestina.”* (Dokumen Mukhtar Masyumi ke VIII di Surabaya, 23-27 Desember 1954.) Dua bulan sebelumnya, *Nieuwe Courant* juga memberitakan bahwa PSII dalam kongresnya di bulan Januari 1948 menyatakan penolakan atas penyekatan Palestina. Sikap ormas Islam ini tak berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia dalam mendukung Palestina.

Penderitaan rakyat Palestina menjadi sumber inspirasi bagi Kiai Saifuddin Zuhri untuk menyusun sebuah karya berjudul *“Palestina dari Zaman ke Zaman”* pada bulan Desember 1947. Buku ini ditulis dalam suasana perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena pertimbangan strategis. Buku ini memuat perjuangan rakyat Palestina dalam upaya meraih kemerdekaan serta kegigihan mereka dalam melawan pasukan Zionis. Melalui buku tersebut, Kiai Saifuddin Zuhri berupaya membangkitkan solidaritas para pembaca terhadap perjuangan bangsa Palestina.

Dalam buku tersebut, Kiai Saifuddin Zuhri antara lain menyampaikan sejumlah argumentasi bahwa sejarah dan prinsip keadilan tidak akan pernah membenarkan tindakan seorang tamu—dalam hal ini bangsa Yahudi—yang datang sebagai pihak asing tanpa ikatan sejarah maupun kultural, kemudian merampas hak dan bahkan mengusir pemilik sah tanah tersebut, yaitu bangsa Palestina. Ia juga menegaskan bahwa sejarah akan selalu berpihak kepada setiap bangsa yang berjuang mempertahankan nasibnya, terlebih lagi jika perjuangan itu ditempuh dengan pengorbanan yang besar, sebagaimana dilakukan oleh bangsa Arab di Palestina.

KH. Saifuddin Zuhri menekankan bahwa adalah suatu hal yang mustahil jika bangsa Arab, yang telah berjuang dengan pengorbanan besar demi mempertahankan nasib dan tanah airnya, lantas menyerahkan begitu saja apa yang telah diperolehnya kepada bangsa asing seperti Yahudi, yang datang justru untuk menindas dan memperbudak mereka. Ia menambahkan bahwa pada masa lalu, bangsa Turki (Utsmani) memang berperan sebagai pelindung atau pemangku kekuasaan di Palestina, tetapi bukan sebagai penjajah. Bahkan saat itu, hubungan antara bangsa Turki dan bangsa Arab telah dipersatukan oleh ikatan keislaman selama berabad-abad, berdasarkan semangat ukhuwah Islamiyah sebagai sesama Muslim.

KH. Saifuddin Zuhri menunjukkan sikap yang sangat tegas terhadap proses pendudukan Yahudi atas Palestina. Dalam perspektif postkolonialisme, pernyataan beliau mencerminkan wacana resistensi terhadap kolonialisme dalam bentuk baru (neo-kolonialisme) yang dijalankan melalui proyek Zionisme dan didukung kekuatan imperialisme Barat, terutama Inggris.

Pernyataan beliau bahwa “mustahil bangsa Arab menyerahkan tanahnya kepada bangsa asing” mencerminkan penolakan terhadap logika kolonial, yang dalam banyak kasus membenarkan perampasan tanah dan pengabaian terhadap hak historis penduduk lokal atas nama proyek modernisasi, agama, atau peradaban. Dalam konteks Palestina, pendudukan tersebut bukan semata transfer kekuasaan, melainkan bentuk penindasan sistemik yang menghilangkan agensi politik bangsa Arab Palestina.

Lebih jauh, ketika KH. Saifuddin Zuhri menyinggung peran Turki Utsmani bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai pelindung dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, beliau menampilkan satu bentuk narasi alternatif terhadap kolonialisme. Di sini, kekuasaan Islam dilihat bukan sebagai dominasi, melainkan sebagai kesatuan spiritual dan kultural yang menegaskan solidaritas antarsesama muslim. Hal ini berbeda dari bentuk kolonialisme Eropa yang menanamkan sistem apartheid politik dan segregasi etnis seperti yang kelak diterapkan dalam pembentukan negara Israel.

Pandangan ini selaras dengan konsep Edward Said tentang orientalisme, yaitu bagaimana Barat mencitrakan Timur (dunia Islam) sebagai pihak yang perlu dikendalikan, direkayasa, dan dibentuk sesuai kepentingan kolonial. Dengan menggunakan kerangka berpikir KH. Zuhri, orientalisme Zionis yang diback-up oleh Barat telah memperlakukan Palestina sebagai ruang kosong yang bisa diisi ulang, tanpa mempertimbangkan eksistensi historis dan kedaulatan moral bangsa Arab setempat.

B. Solidaritas dan Dukungan Moral

Melalui pidato-pidato politik dan tulisan-tulisan keagamaannya, KH. Saifuddin Zuhri secara konsisten menyerukan kepada umat Islam Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Seruan tersebut tidak bersifat temporer atau reaktif, tetapi merupakan bagian dari komitmen panjang beliau terhadap perjuangan anti-kolonial dan solidaritas Islam global. Dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menjabat sebagai Menteri Agama RI, ia menegaskan bahwa membela Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, melainkan juga amanah keimanan.

Menurut KH. Saifuddin Zuhri, keterlibatan umat Islam dalam isu Palestina memiliki dimensi spiritual yang mendalam, karena di wilayah tersebut berdiri Masjid al-Aqsha, kiblat pertama umat Islam dan salah satu dari tiga masjid suci dalam Islam bersama Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap penderitaan bangsa Palestina berarti pengkhianatan terhadap nilai-nilai iman, sebab Masjid al-Aqsha bukan sekadar simbol sejarah, melainkan bagian dari identitas spiritual umat Islam seluruh dunia.

KH. Saifuddin juga kerap menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan kelanjutan dari perjuangan umat Islam Indonesia dalam menentang kolonialisme. Ia menggambarkan penderitaan bangsa Palestina sebagai cermin dari luka-luka yang dulu dialami bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh sebab itu, ia menyeru agar umat Islam Indonesia tidak bersikap netral atau apatis terhadap tragedi yang menimpa rakyat Palestina.

Dalam tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai media Islam dan dalam karya autobiografinya “Guruku Orang-Orang dari Pesantren”, KH. Saifuddin Zuhri menyebut bahwa umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk berdiri bersama Palestina. Ia percaya bahwa kemerdekaan yang telah diraih Indonesia harus menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain yang masih tertindas. Dukungan terhadap Palestina, menurutnya, adalah ekspresi dari ukhuwah Islamiyah dan wujud solidaritas global terhadap perjuangan kemerdekaan.

C. Kritik terhadap Politik Global

KH. Saifuddin Zuhri mengecam keras kebijakan kolonial Inggris yang memfasilitasi pendirian negara Israel di tanah Palestina. Menurutny, langkah Inggris tersebut bukan semata-mata bentuk kebijakan

luar negeri, melainkan bagian dari proyek besar imperialisme Barat yang terstruktur dan sistematis dalam melemahkan kekuatan dunia Islam. Ia melihat bahwa Inggris, sebagai kekuatan kolonial utama di Timur Tengah setelah Perang Dunia I, telah menggunakan mandatnya atas Palestina (1917–1948) untuk menjalankan agenda pecah-belah terhadap bangsa Arab dan umat Islam secara keseluruhan.

Dalam pandangan KH. Saifuddin, dukungan Inggris terhadap gerakan Zionisme yang dipertegas melalui Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Inggris, katanya, menjanjikan tanah yang bukan miliknya kepada pihak yang tidak berhak, sambil mengabaikan hak-hak historis dan eksistensial rakyat Palestina yang telah mendiami wilayah itu selama berabad-abad. Pendudukan ini, menurut Saifuddin, tidak dapat dilepaskan dari logika kolonialisme yang bertujuan memecah kekuatan Islam, membangun negara-negara boneka, dan menciptakan ketergantungan politik di kawasan Timur Tengah.

Dalam pidato dan tulisannya, KH. Saifuddin Zuhri menghubungkan proyek Zionisme dengan kepentingan strategis Barat di jantung dunia Islam. Ia menyatakan bahwa keberadaan negara Israel yang ditopang oleh Inggris dan kemudian Amerika Serikat adalah upaya sistematis untuk menjadikan Palestina sebagai pangkalan dominasi Barat atas sumber daya dan geopolitik Timur Tengah. Hal ini, dalam pandangannya, telah mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Sebagai respons terhadap kebijakan ini, KH. Saifuddin menyerukan penguatan solidaritas antarumat Islam lintas negara. Ia meyakini bahwa satu-satunya cara melawan ketidakadilan dan strategi pecah-belah imperialis adalah dengan membangun kembali kesadaran pan-Islamisme dan komitmen kolektif dalam membela keadilan global⁴. Solidaritas umat Islam, menurutnya, tidak boleh hanya bersifat simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk diplomasi, bantuan kemanusiaan, serta tekanan politik terhadap kekuatan-kekuatan besar dunia yang melegitimasi penjajahan di Palestina.

SIMPULAN

Respons KH. Saifuddin Zuhri terhadap pendudukan Yahudi di Palestina tahun 1936-1948 menunjukkan posisi ideologis dan moral yang tegas dalam menentang imperialisme dan segala bentuk penindasan terhadap bangsa tertindas. Bagi KH. Saifuddin, pendudukan Palestina bukan sekadar persoalan geopolitik, melainkan bagian dari konspirasi kolonialisme Barat yang bertujuan memecah belah kekuatan dunia Islam dan meneguhkan dominasi asing di kawasan strategis Timur Tengah.

Ia mengidentifikasi Zionisme sebagai bentuk kolonialisme modern, yang disponsori oleh kekuatan besar dunia seperti Inggris dan kemudian Amerika Serikat. Dukungan Inggris terhadap pendirian negara Israel dilihatnya sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak historis rakyat Palestina, serta sebagai bentuk ketidakadilan global yang melanggar prinsip kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.

Dalam konteks itu, KH. Saifuddin Zuhri mendorong solidaritas umat Islam Indonesia untuk membela Palestina melalui pendekatan moral, spiritual, dan politik. Ia menegaskan bahwa pembelaan terhadap Palestina adalah amanah keimanan, karena di tanah itu terletak Masjid al-Aqsha, situs suci umat Islam. Dukungan terhadap Palestina juga dianggap sebagai kelanjutan dari semangat antikolonialisme yang melandasi perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Dengan demikian, respons KH. Saifuddin Zuhri mencerminkan pemikiran Islam yang progresif, yang memadukan kesadaran historis, nilai-nilai keagamaan, dan prinsip keadilan internasional, serta menyerukan pentingnya kebangkitan umat Islam dalam menghadapi ketidakadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghadiyry, F. (2010). *Sejarah Palestina: Asal-Muasal Konflik Palestina Israel*. Yogyakarta: Books Marks.
- Al-Mur'asyli, A. (1984). *Al-Mausu'ah Al-Filisthiniyyah Jild 2*. Damaskus: Haiah Al-Mausu'ah Al-Filisthiniyyah.
- Al-Rayis, M. D. (2002). *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Armstrong, K. (1996). *Jerusalem: One City, Three Faiths*. New York: Ballantine Books.
- Azra, A. (2002). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.
- Bachtiar, T. A. (2018). *Jas Mewah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah dan Dakwah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Bruinessen, M. (1995). Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question. *Studia Islamika*, 2 No. 3, 115-140.
- Fanon, F. (1963). *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.
- Faroghi, S. (2005). *Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire*. London: I.B. Tauris.
- Friedman, I. (2000). *Palestine: A Twice-Promised Land? Vol. 1*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Fromkin, D. (2001). *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*. New York: Owl Books.
- Garraghan, G. (1946). *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gelvin, J. (2005). *The Israel-Palestine Conflict: One Hundres Years of War*. New York: Cambridge University Press.
- Gilbert, M. (2011). *Jerusalem: A Biography*. New York: Doubleday.
- H.S.W. Corrigan. (1967). German-Turkish Relations and the Outbreak of War in 1914: are-assessment. *Past and Present*, 36, 144-152.
- Herzl, T. (2009). *Al-Daulah Al-Yahudiyah*. (M. Y. Ades, Trans.) Kairo: Maktabah Imam Al-Bukhari.
- Hourani, A. (1991). *A History of the Arab Peoples*. New York: Faber and Faber.
- Hambaliana, D., Alfahmi, I. N. H., Suprianto, S., Nurcahya, Y., Samsudin, S., & Sudana, D. sukardjo. (2024). Transformasi Pemikiran Pembaharuan Islam di Indonesia Abad 20 (Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tahun 1970–2001). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 391–402. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2464>
- Hakim, Ajid, and others, 'Echoes of Spiritual Greatness: A Review of Manaqib Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani', *International Journal of Nusantara Islam*, 13.1 (2025) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ijni/article/view/45227>
- Khalidi, R. (1997). *Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness*. New York: Columbia University Press.
- Khalidi, R. (2006). *The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood*. Boston: Beacon Press.
- Khoury, P., & Kostiner, J. (1990). *Tribes and State Formation in the Middle East*. Berkeley: University of California Press.
- Laqueur, W. (1972). *A History of Zionism*. New York: Schocken Books.
- Lewis, B. (1961). *The Emergence of Modern Turkey*. London: Oxford University Press.
- Lewis, B. (1995). *The Middle East: A Brief History of the Last 2.000 Years*. New York: Scribner.

- Masyrofah. (2023). *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Morris, B. (2001). *Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001*. New York: Vintage Books.
- Mukayat. (1985). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Depdikbud.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pappe, I. (2004). *A History of Modern Palestine: One Land Two Peoples*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pappe, I. (2006). *The Ethnic Cleansing of Palestine*. Oxford: Oneworld Publications.
- Rogan, E. (2009). *The Arabs: A History*. New York: Basic Books.
- Rogan, E. (2018). *The Fall of the Khilafah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Sachar, H. (2007). *A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time*. New York: Knopf.
- Said, E. (1978). *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Shaleh, M. M. (2002). *Dirasah Manhajiyah fi Al-Qadhiyyah Al-Filisthiniyyah*. Kuala Lumpur: Fajar Ulung.
- Shaleh, M. M. (2002). *Palestina: Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shaleh, M. M. (2013). *Tanah Palestina dan Rakyatnya*. Jakarta: Pustaka Hanan.
- Shlaim, A. (2001). *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. New York: W.W. Norton.
- Smith, C. (2017). *Palestine and the Arab-Israel Conflict*. Boston: Bedford/St. Martin's.
- Ze'evi, D. (1996). *An Ottoman Century: The District of Jerusalem in the 1600s*. Albany: State University of New York Press.
- Zuhri, S. (1987). *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Zuhri, S. (2013). *Berangkat dari Pesantren*. Yogyakarta: LkiS.
- Zuhri, S. (2023). *Palestina dari Zaman ke Zaman*. Banyuwangi: Komunitas Pegon Banyuwangi.
- Bandera Islam, 30 Oktober 1924.
- Bendera Islam, 8 Januari 1925.
- Neratja, 4 November 1922.
- Hindia Baroe, 16-18 Oktober 1924.
- Bandera Islam, 16 Oktober 1924.
- Bandera Islam, 14 Desember 1924.
- Nieuwe Courant, 31 Januari 1948.
- Prof. KH. Saifuddin Zuhri: Sosok Ulama Pejuang Kemerdekaan,
<https://www.lukmansaifuddin.com/ysz/index.php/prof-kiai-saifuddin-zuhri/prof-kh-saifuddin-zuhri-sosok-ulama-pejuang-kemerdekaan> . (Diakses pada 17 Mei 2024)